

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
16 AGUSTUS 1984

(PIDATO DAN LAMPIRAN)

REPUBLIK INDONESIA



*Presiden Republik Indonesia
Soeharto*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang saya muliakan;
Hadirin yang berbahagia;
Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Hari ini, untuk kesekian kalinya saya berbicara di hadapan Sidang Dewan yang mulia dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kemerdekaan Nasional kita, yang Insya Allah, besok pagi akan kita peringati dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan.

Dalam Sidang Dewan Perwakilan seperti sekarang ini, yang telah berkembang menjadi kebiasaan nasional yang baik, maka setiap tahun kita bertemu dalam suasana tanggung jawab bersama dan kesetiaan bersama terhadap dasar dan cita-cita perjuangan yang telah dikumandangkan ke seluruh dunia pada tanggal keramat 17 Agustus 1945, oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat Indonesia.

Sekarang, 39 tahun sudah berlalu Proklamasi Kemerdekaan Nasional itu. Kita bersama telah jauh berjalan dengan segala suka dan duka, dengan segala harapan dan kecemasan, dengan segala sukses dan kesulitannya. Tidak sedikit jurang yang telah kita turuni, tidak terbilang gunung yang telah kita daki, lautan-lautan telah kita arungi. Semuanya itu membuat kita menjadi bangsa gemblengan, yang makin dewasa, makin kuat dan makin tahan uji.

Secara keseluruhan, sebagai bangsa kita telah banyak mencapai kemajuan dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan kita. Namun kita sadar, diukur dalam sejarah pembangunan suatu bangsa, maka perjalanan kita selanjutnya masih akan panjang dan berat. Setiap kali kita memperingati ulang tahun Proklamasi, marilah kita sadari tugas sejarah di masa depan itu dengan rasa tanggung jawab bersama yang sebesar-besarnya.

Karena itu pada hari-hari kita memperingati ulang tahun Kemerdekaan Nasional kali ini, marilah kita berhenti sejenak dan membuat renungan sedalam-dalamnya mengenai tugas-tugas sejarah kita ke depan.

Bersamaan dengan itu, saat ini, kita pun harus menengok ke belakang; merenungkan makna dari perjuangan bersama bangsa kita di masa lampau. Hal ini penting, sebab apa yang kita capai saat ini merupakan hasil dari perjalanan sangat panjang di masa lampau dan apa yang akan kita capai di masa datang harus merupakan peningkatan dan perbaikan dari apa yang kita kerjakan hari ini. Dengan demikian kita memandang keseluruhan sejarah pertumbuhan dan perkembangan bangsa kita dalam kesinambungan, pembaharuan, koreksi dan peningkatan yang tidak ada henti-hentinya.

Suasana peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Nasional kita kali ini mempunyai makna yang khusus. Sebabnya ialah karena sejak April yang lalu kita mulai memasuki Repelita

IV. Telah menjadi tekad nasional kita yang sebulat-bulatnya, seperti yang kita amanatkan sendiri pada diri kita dalam GBHN 1983, bahwa dalam Repelita IV itu kita akan menciptakan kerangka landasan dan dalam Repelita V melanjutkannya dalam usaha mewujudkan landasan yang kukuh kuat bagi terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di saat itulah --mulai Repelita ke-VI-- kita akan mampu tinggal landas menuju masyarakat yang kita cita-citakan.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Perjuangan Orde Baru, ialah perjuangan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan yang sambung menyambung telah kita laksanakan dengan selamat selama Repelita I, II dan III.

Dengan pelaksanaan pembangunan itu bukan saja kita telah mampu membuat titik balik dari kemerosotan kehidupan bangsa kita yang mencapai titik terendahnya pada pemberontakan PKI di tahun 1965 menjadi garis naik dalam zaman pembangunan di segala bidang, tetapi kita juga sangat diperkaya dengan pengalaman dan semangat, yang membangkitkan kepercayaan kepada kemampuan kita sendiri.

Dari sekarang kita telah dapat melihat jalan sejarah yang akan kita tempuh di hadapan kita. Jalan itu adalah jalan yang berat, walaupun bukan jalan yang tidak mungkin kita lalui.

Karena itu kita bertekad untuk melanjutkan perjalanan dengan penuh harapan namun tetap dalam suasana keprihatinan dan kewaspadaan.

Kita lanjutkan perjalanan itu dengan tekad agar harapan kita dapat menjadi kenyataan dan dengan tekad agar kita dapat mengatasi segala masalah dan tantangan yang menghadang.

Jalan di depan kita itu juga diliputi oleh pengaruh perkembangan internasional, yang umumnya di luar jangkauan tangan kita

untuk mengatasinya. Pada satu pihak, perkembangan internasional itu mempunyai pengaruh terhadap perkembangan di Tanah Air, baik pengaruh yang menguntungkan maupun pengaruh yang merugikan. Pada pihak lain, kita ikut memikul tanggung jawab agar perkembangan internasional tadi mempunyai pengaruh yang positif bagi terwujudnya dunia yang tertib, damai dan adil.

Melihat lima belas tahun ke depan, menjelang berakhirnya abad ke 20 ini, maka kita menyadari sedalam-dalamnya bahwa dunia sekarang sedang memasuki salah satu kurun waktu yang paling rawan dalam sejarah umat manusia dan kemanusiaan. Ilmu-ilmu dan teknologi moderen telah memberi manusia kemampuan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kemampuan itu dapat mengarah ke segala penjuru: baik untuk membangun suatu dunia yang damai, adil dan makmur; maupun untuk menghancurkannya dalam sekejap peradaban dan mungkin seluruh kehidupan yang berada di muka bumi kita yang satu ini. Justru menghadapi masa depan dunia yang rawan dan penuh bahaya itulah kita harus melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sidang Dewan yang saya ruliakan;

Menjelang suka cita kita merayakan hari ulang tahun Kemerdekaan besok, maka ingatan kita tidak mungkin terlepas dari Generasi '45, Generasi Pembebas, yang dalam sejarah kemerdekaan kita telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negaranya selama hampir empat dasawarsa. Itu berarti Generasi '45 telah makin dekat dengan perampungan tugas historisnya, sambil berjuang bahu membahu dengan Generasi Penerus, generasi yang lebih muda. Secara bertahap generasi-generasi yang lebih muda ini,

sekarang, mulai ikut memikul bagian yang makin besar dalam tanggung jawab bersama dan perjuangan bersama mengisi kemerdekaan dengan pembangunan.

Berbeda dengan Generasi Pembebas dari banyak bangsa-bangsa lain, yang sering terpukau dan tertawan oleh kenangan perjuangan masa lampau, maka Angkatan '45 kita sejak lima belas tahun yang lalu telah mengantarkan bangsanya memasuki era pembangunan. Angkatan '45 itu sekarang sedang merampungkan tugas historisnya dalam rangka melaksanakan tugas nasional bersama, ialah meletakkan landasan yang memadai agar supaya Generasi Penerus nanti di atas landasan yang telah mantap itu dapat memacu pembangunan negara dan bangsa menuju masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan.

Mungkin, banyak di antara Angkatan '45 itu tidak dapat lagi ikut mengalami tahap tinggal landas yang kita harapkan berlangsung menjelang akhir abad ini dalam Repelita VI nanti.

Namun, selama masih diperlukan mereka pasti akan terus ikut berjuang untuk mengantarkan rakyat Indonesia sejauh mungkin dalam perjalanan menuju tinggal landas itu. Ini berarti pertama-tama Angkatan '45 akan menunjukkan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya untuk ikut mewujudkan kerangka landasan dalam Repelita ke-IV dan mungkin juga memantapkan landasan tersebut dalam Repelita ke-V. Setidak-tidaknya, Angkatan '45 akan merasa bahagia dan tenteram hatinya, jika telah ada tanda-tanda yang jelas bahwa secara ideologis bangsa kita telah mantap, secara politis bangsa kita telah siap, secara ekonomis bangsa kita telah kuat, secara budaya bangsa kita telah matang dan secara hankam bangsa kita telah siaga mewujudkan dan mengamankan landasan bagi tahap tinggal landas tadi.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

GBHN 1983 memberi amanat luhur bagi kita semua, ialah amanat untuk melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Karena itu pada awal perjalanan kita memasuki Repelita IV ini sangat lah perlu kita merenungkan sedalam-dalamnya dan dengan perasaan-perasaan yang hening tenang apa yang kita pikirkan mengenai pembangunan sebagai pengamalan Pancasila tadi.

Yang pertama-tama menjadi renungan kita ialah, bahwa penegasan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila itu berarti bahwa pembangunan kita selanjutnya harus merupakan kelanjutan, peningkatan dan pembaharuan yang terus menerus terhadap perjuangan kita di masa lampau yang harus selalu berlandaskan kepada Pancasila.

Karena Pancasila merupakan kepribadian kita sendiri, maka pembangunan kita yang merupakan pengamalan Pancasila itu pun kita rancang dan kita laksanakan menurut konsep dan model kita sendiri. Kita memang perlu mempelajari konsep-konsep atau model-model pembangunan bangsa-bangsa lain. Tetapi adalah salah jika kita meniru begitu saja konsep atau model pembangunan negara lain, sekali pun mereka berhasil melaksanakan di negaranya sendiri. Kita pelajari konsep-konsep dan model-model pembangunan negara lain dengan menyaring apa yang cocok dan apa yang tidak cocok untuk pembangunan kita sendiri.

Kita menyadari bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tidak merupakan konsep atau model yang sekali jadi. Saya sering mengingatkan kita semua agar pengamalan Pancasila itu kita laksanakan secara kritis, kreatif dan dinamis. Dengan demikian Pancasila akan terasa selalu memberi kesegaran dalam kehidupan masyarakat kita.

Konsep dan model pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila akan terus berkembang dan tumbuh dalam menjawab tantangan dan masalah yang kita hadapi dalam pembangunan masyarakat kita dengan selalu berusaha mengamalkan sebaik-baiknya Pancasila itu sebagai satu kebulatan. Dengan demikian, maka kita dapat membangun masyarakat maju yang adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila. Ialah suatu masyarakat Indonesia yang mempunyai ciri dan kepribadian yang khas Indonesia di tengah-tengah masyarakat internasional. Masyarakat yang kita bangun itu mudah-mudahan akan merupakan sumbangan kita dalam membangun masyarakat internasional yang mampu mengatasi krisis-krisis yang sedang melanda masyarakat-masyarakat moderen di mana-mana dewasa ini.

Dengan menjalankan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, sekaligus kita bertekad untuk menghindarkan bermacam-macam kegagalan yang pernah dialami bangsa-bangsa lain dalam memasuki tahap pembangunan masyarakat moderen. Kita menyaksikan, misalnya, sejumlah negara mengalami kegagalan yang berkepanjangan dalam memasuki tahap industrialisasi karena mereka kurang berhasil menangani masalah-masalah sosial ekonomi yang bersifat mendasar. Sejarah juga menunjukkan ada negara yang terpelanting menjadi totaliter dalam memasuki tahap industrialisasinya. Dengan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila yang memberi saluran secara serasi kepada semua kekuatan-kekuatan, faktor-faktor dan aspirasi-aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat maka kita bertekad menghindarkan diri dari kegagalan-kegagalan pahit seperti yang dialami, oleh bangsa-bangsa lain itu.

Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan harus kita sadari sedalam-dalamnya sebagai kebijaksanaan yang harus kita pegang seteguh-teguhnyanya dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Dengan telah memiliki Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ialah EKA PRASETYA PANCAKARSA, maka pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila diharapkan akan makin nyata arahnya dan makin dirasakan oleh kita semua wajah dan wujud pembangunan masyarakat Pancasila : masyarakat yang selalu takwa dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menghormati harkat dan martabat sesama manusia, yang selalu mementingkan kepentingan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan dan pribadi, yang menggunakan jalan musyawarah kerakyatan dalam memecahkan masalah-masalah nasional dan masalah bersama dan yang selalu berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata dalam mengejar kemajuan, pertumbuhan dan kemakmuran.

Demikianlah kita melihat gambaran umum mengenai pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Sidang Dewan yang saya muliakan;

Walau pun seperti tadi saya singgung, mungkin tidak semua dari kita yang masih hidup sekarang ini sempat mengalami tahap tinggal landas menjelang akhir abad ke-20 nanti, namun tanggung jawab kita sebagai pejuang memanggil kita agar kita semua tanpa kecuali ikut serta menyiapkan syarat-syarat terciptanya landasan bagi tinggal landas menuju masyarakat yang kita cita-citakan itu. Baru apabila syarat-syarat itu terpenuhi maka apa yang digambarkan dalam GBHN sebagai tahap tinggal landas akan benar-benar terwujud. Karena dalam Repelita IV ini kita harus meletakkan kerangka landasan bagi tahap tinggal landas tadi, maka dari sekarang kita harus telah memiliki gambaran umum mengenai syarat-syarat landasan bagi tinggal landas tadi. Dan syarat-syarat itu sebenarnya telah digambarkan secara umum di dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang dalam Garis-

garis Besar Haluan Negara, yang dirumuskan dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, baik di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial-budaya dan hankam.

Karena itu setiap usaha dan langkah yang kita ambil harus diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut tadi, dalam Repelita IV mengusahakan kerangkanya dan dalam Repelita ke-V memantapkannya.

Panca Krida Kabinet Pembangunan IV diarahkan untuk mewujudkan kerangka landasan itu, Repelita ke-IV yang sekarang sedang kita laksanakan juga untuk meletakkan kerangka landasan tersebut.

Demikian juga dikeluarkannya undang-undang perpajakan dan undang-undang perindustrian tujuannya antara lain juga untuk memperlancar terwujudnya kerangka landasan, khususnya di bidang ekonomi.

Dan apabila Pemerintah baru-baru ini menyampaikan sejumlah Rancangan Undang-undang mengenai penyempurnaan pemilihan umum, tentang Kedudukan dan Susunan MPR, DPR dan DPRD, mengenai Partai Politik dan Golongan Karya, mengenai Referendum dan mengenai organisasi kemasyarakatan dalam rangka melaksanakan GBHN dan Ketetapan-ketetapan MPR lainnya, maka sasarannya juga tidak lain untuk mewujudkan kerangka landasan, khususnya di bidang politik.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Dengan GBHN 1983 kita telah mengambil keputusan nasional teramat penting yang merupakan langkah maju dalam pembangunan politik, ialah agar Partai Politik dan Golongan Karya menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Apabila semua kekuatan sosial politik telah menggunakan Pancasila sebagai

satu-satunya asas, maka di masa depan, semua kekuatan sosial politik itu akan berlomba-lomba menawarkan gagasan yang sebaik-baiknya dan tokoh-tokoh yang secakap-cakapnya kepada bangsanya dalam perlombaan besar pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dalam rangka mencapai tujuan nasional. Oleh karena semua kekuatan politik telah secara terbuka menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka akan mudah dicegah dan dihindarkan menajamnya pertentangan golongan dalam usaha mencapai tujuan masing-masing yang mengakibatkan timbulnya bentrokan yang membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

Dengan penegasan semua kekuatan sosial politik mengenai satu-satunya asas Pancasila yang mereka gunakan, maka di satu pihak kita semua akan terbebas dari sisa-sisa saling curiga dan khawatir yang telah tumbuh karena pengalaman nyata di masa lalu; dan di lain pihak, lenyapnya saling curiga dan khawatir tadi akan menyegarkan tumbuh suburnya demokrasi Pancasila.

Dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak berarti kita akan mengabaikan atau menurunkan kadar kita dalam usaha mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia. Sebaliknya kita akan mengembangkan hubungan yang sebaik-baiknya antara kehidupan beragama dan kehidupan politik dalam masyarakat Indonesia.

Agama-agama merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi para penganutnya masing-masing, untuk sebagai warga negara yang bertanggung jawab menjatuhkan pilihannya kepada kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada, yang semuanya telah menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dengan demikian maka setiap agama yang ada di Indonesia dapat memberikan dasar etik dan moral yang kuat kepada kehidupan politik.

Pemerintah juga telah menyampaikan kepada Dewan yang terhormat Rancangan Undang-undang tentang Organisasi Masyarakat. Ini merupakan pelaksanaan dari GBHN, dan bahkan pelaksanaan konsepsi Orde Baru sejak kelahirannya dalam rangka usaha meningkatkan peranan organisasi-organisasi masyarakat dalam pembangunan nasional sesuai dengan bidang kegiatan, profesi dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka inilah, maka perlu ditingkatkan usaha-usaha memantapkan dan menata organisasi masyarakat itu dengan mengeluarkan undang-undangnya.

Organisasi masyarakat kita tidak terbilang banyaknya, dengan berbagai ragam corak kegiatan dan sifatnya. Tidak sedikit di antaranya yang telah tumbuh bersama-sama lahirnya pergerakan kemerdekaan kebangsaan dahulu. Mereka berperan terus dalam masa mempertahankan dan menegakkan Kemerdekaan Nasional sampai dalam zaman pembangunan lahir batin sekarang ini. Dengan undang-undang organisasi masyarakat, maka kita tidak akan mengurangi atau membatasi keanekaragaman yang mencerminkan kreativitas dan kebebasan rakyat kita, sebab justru semuanya itu merupakan kekayaan dan sumber kekuatan bangsa kita.

Undang-undang organisasi masyarakat itu merupakan pelaksanaan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar yang menegaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Dasar ini mengingatkan kepada kita semua, bahwa pasal itu menampilkan hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis. Tegasnya, undang-undang ini tidak untuk membatasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul dari masyarakat, melainkan justru memberi saluran yang tertib dan teratur, agar semua warga negara dapat mewujudkan tanggung jawab sosialnya dalam bersama-sama membangun masyarakat Pancasila.

Karena pada tahun '45 kita telah berbulat, hati menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, karena di tahun '78 kita telah memiliki P4 dan karena di tahun '83 kita telah menegaskan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan sosial politik, maka dengan undang-undang organisasi kemasyarakatan itu kita ingin menegaskan bahwa semua organisasi kemasyarakatan mempunyai juga satu persamaan. Yaitu : bahwa semuanya menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam arti asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam rangka partisipasi aktif mereka dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Dalam rancangan undang-undang yang diajukan Pemerintah itu, juga dijamin tetap adanya organisasi kemasyarakatan yang dibentuk secara sukarela oleh -anggota masyarakat warga negara Indonesia atas dasar persamaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini justru menunjukkan betapa besar perhatian kita kepada kehidupan keagamaan masyarakat kita dan betapa kita menempatkan kehidupan keagamaan masyarakat itu di tempat yang sangat terhormat. Di lain pihak, hal itu sama sekali tidak berarti ada niat sedikitpun langsung atau tidak langsung untuk mengurangi kebebasan beragama. Kebebasan beragama tegas-tegas dijamin oleh Undang-Undang Dasar, dan juga dinyatakan dalam Ketetapan MPR No. 11 tahun '78 tentang P4 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi dari manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat dan harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak kebebasan beragama bukan-pemberian negara, dan lebih-lebih lagi bukan pemberian golongan. Untuk kesekian kalinya saya perlu menegaskan, bahwa agama dihormati sepenuhnya dan tidak pernah akan kita campur adukkan dengan Pancasila.

Sifat dan hakekat dari lembaga-lembaga keagamaan menurut pemahaman dan keyakinan dari para penganutnya tetap dihormati sepenuhnya. Dalam negara Pancasila maka setiap warga negaranya memperoleh inspirasi dan motivasi dari agama dan kepercayaan yang mereka anut masing-masing dalam memikul bersama tanggung jawab membangun bangsa dan negaranya. Hal ini tidak akan dikurangi sedikit pun oleh undang-undang yang menyangkut kekuatan sosial politik, undang-undang organisasi kemasyarakatan atau undang-undang lain yang mana pun. Undang-undang organisasi kemasyarakatan justru memberi jaminan bahwa sumber motivasi dan inspirasi dari agama-agama itu dapat disumbangkan sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional kita sebagai pengamalan Pancasila. Antara agama dan Pancasila tidak ada pertentangan nilai-nilai. Dalam negara yang berdasarkan Pancasila, dalam masyarakat Pancasila, semua agama terjamin kehidupannya dan diberikan kesempatan yang luas agar tumbuh dengan subur. Sebaliknya, kesemarakan kehidupan beragama akan memperkuat, memperkaya dan menyegarkan Pancasila. Kita dapat menjadi warga negara Pancasila yang baik dan sekaligus menjadi umat beragama dengan keimanan yang utuh.

Betapa indah dan betapa dalamnya makna kehidupan kita dalam masyarakat yang demikian itu !

Selanjutnya, jika kelima undang-undang yang menyangkut kehidupan politik dan organisasi kemasyarakatan tadi telah dapat kita rampungkan, maka akan bertambah mantap dan segarlah kehidupan politik yang demokratis dan konstitusional yang selama ini telah dapat kita kembangkan. Dinamika politik yang didukung oleh stabilitas itu merupakan salah satu hasil besar pembangunan politik kita selama ini.

Sementara itu dalam rangka mewujudkan landasan di bidang politik, kita juga terus bekerja keras untuk menegakkan

kerangka landasan di bidang hukum yang juga sangat esensial bagi kita dalam menumbuhkan negara Pancasila yang berdasarkan hukum. Sebagai akibat dari kemajuan yang kita capai dalam pembangunan, maka di masa-masa yang akan datang dapat kita bayangkan dari sekarang bahwa masyarakat akan bergerak dan berubah dengan cepat disertai dengan perubahan-perubahan tata nilai. Berbagai macam kepentingan akan bermunculan, yang secara realistis harus kita akui tidak selamanya sejalan satu dengan yang lain. Dalam keadaan demikian perlu ada pengawasan yang efektif, agar semuanya tadi berjalan selaras, tidak saling berbenturan melainkan saling menunjang ke arah pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kita yang makin mantap dan makin dewasa. Karena itu jika kita tidak menciptakan kerangka landasan yang tahan uji, kukuh dan berdayaguna di bidang hukum, maka kemajuan tadi akan membawa bermacam-macam konflik kepentingan yang berlarut dan penggunaan yang salah dari kekuasaan politik dan ekonomi yang berbahaya. Negara dan masyarakat yang makin maju mutlak memerlukan hukum yang makin maju dan sikap taat hukum di kalangan penyelenggara negara dan di seluruh kalangan masyarakat.

Penegakan hukum yang selama ini telah diusahakan oleh aparat hukum kita, demikian pula pembinaan dan pembangunan hukum yang selama ini telah kita lakukan, masih harus kita tingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang.

Seterusnya pembangunan kerangka landasan di bidang aparatur negara akan sangat menentukan berhasilnya semua cita-cita nasional kita. Dalam segala pikiran dan langkah, dalam segala keputusan dan tindakannya, aparatur negara pertamanya harus menjadi pembimbing ke arah terwujudnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Di samping kemampuan teknis yang pasti harus ditingkatkan untuk menggerakkan pemba-

ngunan masyarakat kita yang akan bertambah rumit, maka secara terus menerus dalam tubuh segenap aparatur negara harus dikembangkan semangat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa, di samping terus ditingkatkan tindakan pengawasan oleh alat-alat pengawasan yang ada, maka kita harus meningkatkan pelaksanaan pengawasan sosial melalui tata cara yang tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Tentu hal ini memerlukan sikap dewasa dari semua pihak, dari aparatur sendiri maupun dari masyarakat.

Yang juga tidak kalah penting adalah menciptakan kerangka landasan di bidang budaya. Di satu pihak, kerangka landasan di bidang budaya ini harus tetap mengungkapkan kepribadian bangsa kita, sedang di lain pihak kerangka budaya itu harus dapat memberi dasar bagi pertumbuhan masyarakat Pancasila yang moderen, adil, makmur dan lestari. Ini berarti kita tetap memberi kesempatan mekar dari keanekaragaman budaya kita, dengan menjaga agar keanekaragaman itu tidak membahayakan persatuan bangsa melainkan malahan memberi sumbangan yang positif bagi kukuhnya persatuan nasional.

Selanjutnya bidang pertahanan keamanan terus kita kembangkan sehingga dapat menjadi kerangka landasan yang dapat diandalkan dan tahan uji. Kerangka landasan di bidang pertahanan keamanan ini kita beri arti yang seluas-luasnya, di mana tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dwi fungsi ABRI harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga ABRI terus dapat memikul tugas sejarahnya sebagai kekuatan stabilisator dan dinamisator, termasuk di dalamnya kekuatan yang menjaga dan sekaligus menyegarkan terus menerus demokras Pancasila. Kita akan membuktikan ketidak benaran pandangan bahwa peranan ABRI tidak dapat mendorong pertumbuhan demokrasi. Mungkin hal itu telah terbukti bagi bangsa bangsa

lain. Tetapi hal itu tidak akan terjadi dalam negara Pancasila, seperti yang telah ditunjukkan oleh peranan ABRI selama ini dan akan ditunjukkan oleh ABRI buat selama-lamanya.

Saudara-saudara yang terhormat;

Berbarengan dengan tekad kita untuk mewujudkan kerangka landasan di bidang politik, kita juga bertekad dan akan bekerja keras untuk menciptakan kerangka landasan ekonomi yang sangat mutlak. Ini adalah konsekuensi yang logis, karena pembangunan ekonomi tetap menduduki prioritas yang utama dalam gerak pembangunan nasional kita berjangka panjang. Sebab itu, pembangunan ekonomi jelas akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap arah dan sifat pembangunan nasional kita pada umumnya dan perkembangan di bidang-bidang kehidupan lainnya. Dalam meletakkan kerangka landasan di bidang ekonomi kita harus berpegang teguh pada semangat dan cita-cita kita mengenai masyarakat Pancasila, pada sistem ekonomi yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar yang diarahkan oleh GBHN.

Secara khusus setiap langkah dan tindakan, setiap pemikiran dan keputusan, harus selalu kita arahkan untuk makin memperjelas wajah demokrasi ekonomi yang menjadi semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar yang sangat terkenal itu. Pada fihak lain kita harus terus mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat bersamaan dengan penjagaan stabilitas ekonomi agar kita dapat menyalurkan secara kreatif aspirasi-aspirasi dan kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam masyarakat kita, termasuk tenaga kerja, yang jumlahnya makin hari makin bertambah besar. Dengan landasan berpijak yang demikian itu dan dengan melaksanakan sebaik-baiknya program-program ekonomi yang kita susun dalam Repelita ke-IV, maka kondisi dan struktur ekonomi kita akan

tumbuh menjadi makin seimbang, ialah : struktur ekonomi dengan industri yang maju dan kuat yang didukung oleh pertanian yang tangguh pula.

Bagaimana pun pentingnya kerangka landasan dalam berbagai bidang tadi, namun yang menentukan berhasil tidaknya pembangunan kita menciptakan landasan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah manusia Indonesia sendiri. Yang menjadi andalan utama keberhasilan pembangunan nasional kita bukan lah kekayaan alam yang berlimpah ruah, melainkan kualitas manusia Indonesia. Kualitas manusia Indonesia itu lah yang akan menentukan berhasil atau gagalnya usaha kita untuk memasuki tahap tinggal landas nanti. Kualitas manusia Indonesia itu lah yang akan menentukan apakah syarat-syarat yang tadi saya kemukakan dapat kita wujudkan. Terlepas dari pandangan hidup, latar belakang budaya dan perkembangan sejarahnya, maka banyak bangsa lain yang membuktikan diri dapat menjadi bangsa yang maju karena mereka dapat meningkatkan kualitas manusianya, walau pun mereka miskin dengan kekayaan alam.

Di masa silam kualitas manusia Indonesia itu telah menunjukkan kemampuan dalam mengatur negara Nusantara. Di masa-masa berikutnya kualitas manusia Indonesia itu menunjukkan kemampuannya dalam membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan asing dengan kekuatan sendiri. Sejarah sesudah Kemerdekaan Nasional membuktikan bahwa kualitas manusia Indonesia itu mampu mengatasi persoalan-persoalan dan pergolakan-pergolakan yang dialaminya sebagai bangsa yang baru lahir. Dan lima belas tahun terakhir ini, kualitas manusia Indonesia menunjukkan bahwa kita mampu membangun. Dengan bukti-bukti sejarah itu, dengan rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan, dengan terus menerus meningkatkan kualitas manusia Indonesia, maka dengan penuh kepercayaan kita yakin bahwa kita dapat

meningkatkan kualitas kita sehingga mampu berdiri tegak dan dengan kepribadian sendiri tumbuh menjadi bangsa moderen.

Demikianlah, Saudara Ketua Dewan yang terhormat, garis besar gambaran kita yang lebih jelas mengenai masa depan.

Dengan menyadari tugas-tugas dan cita-cita yang ingin kita wujudkan mengenai masa depan itu, maka kita harus memberi jawaban sampai di mana kah kita saat ini berada dalam perjalanan sejarah membangun diri kita dan membangun masa depan itu. Pertanyaan pokok lainnya adalah apakah kita cukup mempunyai alasan dan kekuatan untuk mewujudkan tekad kita untuk menciptakan kerangka landasan dalam Repelita ke-IV ini.

Untuk menjawab pertanyaan pokok itu kita perlu mempunyai tolok ukur bersama yang telah kita sepakati secara nasional. Tolok ukur itu tidak lain adalah tujuan pembangunan kita yang telah ditegaskan dalam GBHN, ialah : pertama, meningkatnya taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil; yang kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Di samping itu, tolok ukur lainnya adalah pelaksanaan Trilogi Pembangunan yang meliputi pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas.

Dengan tolok ukur itu marilah kita teliti keadaan kita dewasa ini setelah kita bekerja keras selama tiga Repelita.

Pertama-tama yang perlu kita amati adalah apakah tingkat kesejahteraan rakyat sekarang ini memang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini merupakan tolok ukur yang paling utama, sebab tujuan pokok kita membangun adalah justru untuk menaikkan taraf kesejahteraan rakyat itu.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang memadai dan dengan keberhasilan kita dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, maka tampak jelas bahwa pendapatan rata-rata telah naik. Seperti yang pernah saya kemukakan di hadapan Sidang

Dewan yang terhormat tepat dua tahun yang lalu, maka dalam menggerakkan pembangunan itu kita telah mencapai kemajuan yang sangat membesarkan hati, yaitu beranjaknya kita dari bangsa yang berpenghasilan rendah menjadi bangsa yang berpenghasilan sedang.

Namun saya menyadari sedalam-dalamnya bahwa besarnya pendapatan rata-rata itu belum tentu menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya. Yang lebih penting ialah apakah pendapatan rakyat banyak benar-benar naik dan apakah kenaikan pendapatan itu merata. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan itu harus berarti sekaligus m-engurangi jumlah mereka yang miskin.

Mengenai hal ini kita tidak perlu ragu-ragu lagi mengatakan, bahwa baik dilihat dari arah penggunaan dana pembangunan maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh selama ini, maka kita secara pasti dan terus menerus telah berusaha untuk menaikkan pendapatan rakyat banyak itu terutama mereka yang berpenghasilan rendah seperti : petani kecil, buruh tani, nelayan, pengrajin dan semua mereka yang kecil-kecil itu. Dalam batas-batas keuangan negara, gaji pegawai negeri dan anggota ABRI pun selalu diusahakan untuk diperbaiki.

Marilah kita teliti agak mendalam masalah ini walaupun dalam garis-garis besarnya saja. Untuk itu marilah kita teliti bidang pendidikan, yang saya tahu, menjadi perhatian semua orang tua. Jika pada tahun '76 di antara 100 penduduk ada 40 orang yang buta huruf, maka angka itu menurun menjadi kurang dari 30 orang di antara 100 penduduk pada tahun '83. Jika pada tahun 1979/'80 dahulu di antara 10 anak lebih dari 8 dapat ditampung di sekolah dasar, maka dalam tahun terakhir Repelita III hampir seluruh anak tertampung di sekolah dasar. Dengan pencaangan wajib belajar yang telah kita mulai dalam Repelita IV ini, maka

dengan rasa lega dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya tidak akan ada lagi anak-anak kita yang tidak tertampung di sekolah dasar. Gerakan wajib belajar itu merupakan salah satu hasil besar pembangunan kita, lebih-lebih mengingat jumlah penduduk kita yang besar dan keadaan geografis Tanah Air kita yang terdiri dari ribuan pulau.

Dalam rangka mengsucceskan pelaksanaan wajib belajar itu secara menyeluruh, maka saya menyambut gembira dan menghargai gerakan secara spontan dari masyarakat untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak usia sekolah kita yang karena sesuatu hal tidak mampu melaksanakan wajib belajar itu.

Kebutuhan dasar manusia yang lain, tingkat kesehatan, juga makin bertambah baik. Jika pada awal Repelita I dahulu kita hanya mempunyai beberapa ribu dokter, perawat dan bidan; maka pada akhir Repelita III-yang baru lalu kita telah mempunyai belasan ribu dokter, puluhan ribu perawat dan puluhan ribu bidan serta tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Di setiap Kecamatan paling tidak kita telah memiliki sebuah Puskesmas, masih ditambah lagi dengan Puskesmas Keliling yang melayani rakyat di daerah-daerah terpencil. Di samping itu, kesehatan penduduk bertambah baik dengan penyediaan kalori dan protein per orang per hari yang terus bertambah baik dari tahun ke tahun. Demikian pula, penyediaan air bersih dan listrik yang makin banyak memasuki desa-desa juga ikut menambah baiknya kesejahteraan rakyat. Perumahan rakyat pun makin banyak kita bangun, yang terus meningkat dari akhir Repelita II sampai akhir Repelita III. Sementara itu perbaikan lingkungan di daerah miskin di perkotaan dan di daerah-daerah pedesaan terus menerus kita adakan tanpa henti-hentinya.

Perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat itu sangat jelas tercermin dalam angka kematian bayi yang menurun dari tahun ke tahun. Umur rata-rata penduduk kita juga bertambah panjang :

dari rata-rata 45 tahun pada awal tahun 70-an menjadi rata-rata 56 tahun pada akhir Repelita 111.

Di samping hal-hal yang saya kemukakan tadi, maka yang sangat membesarkan hati adalah bangkitnya kaum wanita dalam gerak pembangunan umumnya dan usaha mereka sendiri untuk meningkatkan diri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui PKK. Gerakan PKK ini tidak kecil peranannya dalam memperbaiki kesejahteraan keluarga. Karena itu gerakan ini perlu terus menerus kita giatkan di masa-masa yang akan datang, antara lain, dalam usaha meningkatkan kualitas manusia Indonesia seperti yang tadi saya singgung.

Khusus untuk Saudara-saudara kita yang tinggal di daerah pedesaan masih ada gambaran lain yang sangat menggembirakan. Hasil Sensus Pertanian 1983 menunjukkan bahwa secara nasional penguasaan tanah pertanian oleh rumah tangga petani telah meningkat. Bahkan, jumlah rumah tangga petani yang mengusahakan tanah kurang dari setengah hektar juga makin sedikit jumlahnya. Jika pada tahun '80 ada sekitar 11 juta petani yang mengusahakan tanah pertanian kurang dari setengah hektar, maka pada tahun '83 jumlahnya turun menjadi 8,7 juta rumah tangga petani. Peningkatan luas pengusahaan tanah pertanian ini terutama karena pembukaan lahan-lahan pertanian baru di Luar Jawa, khususnya dalam rangka pelaksanaan program transmigrasi, pencetakan sawah baru dan sebagainya.

Sidang Dewan yang saya muliakan;

Di samping merupakan tujuan utama pembangunan, maka perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat itu membangkitkan kepercayaan pada diri kita sendiri bahwa kita akan dapat maju lebih jauh dalam melanjutkan pembangunan. Kepercayaan pada diri sendiri ini merupakan syarat penting bagi tekad untuk mewujudkan

kan kerangka landasan dalam Repelita IV ini.

Persiapan untuk membangun kerangka landasan itu pun telah lama kita lakukan dengan pemerataan pembangunan di semua daerah. Telah kita ketahui bersama, bahwa dari tahun ke tahun selalu tersedia anggaran negara untuk membantu semua daerah : yang terkenal dengan Inpres Daerah Tingkat I, Inpres Daerah Tingkat II, Inpres Desa, Inpres Prasarana Jalan, Inpres SD, Inpres Kesehatan, Inpres Pasar dan sebagainya. Besarnya bantuan itu juga meningkat dari waktu ke waktu. Perhatian yang khusus juga kita berikan kepada daerah minus dan daerah yang relatif masih lambat perkembangan pembangunannya.

Bersamaan dengan usaha-usaha pemerataan pembangunan semua daerah tadi, maka banyak sekali proyek-proyek yang tersebar di semua daerah, yang pada gilirannya telah mendorong kemajuan ekonomi, kecepatan pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat di daerah-daerah. Hasilnya cukup membesarkan hati. Antara tahun '70 sampai tahun '80 semua daerah telah mengalami pertumbuhan pendapatan rata-rata yang cukup cepat, yang bergerak antara 4% sampai hampir 12% setiap tahun. Usaha-usaha pemerataan ini mempunyai arti yang penting, sebab kita harus dapat pemeratakan pembangunan di semua daerah dalam wilayah kita yang luas dan merupakan negara kepulauan, dengan latar belakang budaya dan masalah yang beranekaragam antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Demikianlah, semua daerah memang terus berlomba untuk membangun daerahnya. Daerah yang satu mendapat kemajuan yang lebih besar dan lebih cepat dari daerah yang lain. Dalam rangka memberi penghargaan kepada daerah yang paling berhasil dalam membangun dirinya, maka seperti waktu-waktu yang lalu negara memberi anugerah tanda kehormatan. Untuk Repelita III ini daerah yang mendapat anugerah kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha itu adalah Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Sedangkan Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang telah berhasil dan menerima Parasamya Purnakarya Nugraha dalam pelaksanaan Pelita I dan Pelita II dan dalam Pelita III ini kembali mencapai hasil sebagai 3 Daerah Tingkat I terbaik, mendapatkan tanda kehormatan berupa Prayojanakriya Pata Parasamya Purnakarya Nugraha. Penyerahan tanda-tanda kehormatan ini akan saya lakukan di Padang pada tanggal 22 Agustus yang akan datang. Pada kesempatan ini, saya pribadi dan atas nama bangsa dan negara menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Sumatera Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah atas keberhasilannya itu.

Dengan langkah-langkah itu lah kita mulai berhasil dalam mewujudkan pemerataan dan keserasian pembangunan di semua daerah dan di semua sektor. Di samping hal itu merupakan wujud nyata dari tekad kita untuk mewujudkan Wawasan Nusantara, maka pembangunan yang merata dan serasi antar daerah dan antar sektor itupun merupakan modal yang penting untuk membangun kerangka landasan dalam Repelita ke-IV ini.

Langkah penting lainnya dalam memeratakan pembangunan dan sekaligus memperluas lapangan kerja adalah pemberian kesempatan untuk berkembang bagi golongan ekonomi lemah khususnya pemberian penyuluhan dan kemudahan perkreditan. Seperti secara luas diketahui, kepada golongan ekonomi lemah telah diberikan bermacam-macam kredit seperti : Kredit Investasi Kecil, Kredit Modal Kerja Permanen, Kredit Bimas Pertanian, Kredit Candak Kulak, Kredit Mini, Kredit Midi, Kredit Umum Pedesaan, kredit kepada koperasi, kredit kepada pemborong ekonomi lemah, Kredit Pemilikan Rumah dan lain-lain.

Pemberian kredit perbankan kepada golongan ekonomi lemah ini telah mengalami perkembangan yang pesat selama lima

tahun terakhir, baik dilihat dari jumlah nasabah yang terus meningkat maupun dari nilai kredit yang mereka terima.

Saudara Ketua Dewan yang terhormat;

Perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan tadi hanya bisa terjadi karena selama ini kita telah membangun banyak sekali prasarana dan sarana ekonomi yang juga menyebar ke semua daerah. Kita terus membangun dan memelihara jalan-jalan dan jembatan, memperbaiki jalan-jalan kereta api, membangun pelabuhan dan dermaga-dermaga, menambah angkutan laut baik untuk pelayaran samudera maupun untuk pelayaran dalam negeri sampai ke tempat-tempat yang terpencil, menambah angkutan umum dan bis-bis kota, meningkatkan kemampuan angkutan udara, memperluas jaringan telekomunikasi dari pelayanan pos, kesemuanya itu dalam usaha menghidupkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan pada umumnya. Kita membangun bendungan-bendungan besar dan kecil serta irigasinya dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan pencegahan banjir yang sering menimbulkan bencana; kita juga terus membangun pusat-pusat tenaga listrik serta jaringannya sehingga mampu menggerakkan industri yang makin besar dan menerangi rumah-rumah penduduk.

Pembangunan prasarana dan sarana ekonomi itu telah menaikkan berbagai jenis produksi kita. Saya akan menyinggung beberapa sektor yang penting saja dalam kesempatan ini.

Di bidang pertanian, misalnya, pada tahun terakhir Repelita III kita mencapai produksi beras hampir 24 juta ton. Angka ini telah jauh melebihi sasaran yang ditetapkan dalam Repelita III sebesar 20,6 juta ton. Selama lima tahun terakhir kita dapat menaikkan produksi beras rata-rata sekitar 6,5% setiap tahun. Hasil yang menggembirakan dalam produksi beras tadi merupakan

hasil perpaduan yang erat antara berbagai kegiatan lain mulai dari pembangunan bendungan dan irigasi, terus naiknya produksi dan tersedianya secara cukup sarana produksi, seperti pupuk dan obat hama, ketekunan para peneliti dalam menemukan bibit-bibit unggul sampai pada kesadaran petani untuk bercocok tanam secara baik dan secara bersama-sama dalam kelompok tani. Sementara itu, produksi pertanian lainnya pada umumnya juga terus menaik seperti : produksi palawija, produksi peternakan, produksi ikan, produksi perkebunan seperti kelapa sawit, gula, kopi dan sebagainya.

Dengan produksi beras sebesar hampir 24 juta ton pada tahun terakhir Repelita III seperti yang saya kemukakan tadi dan diperkirakan dalam tahun pertama Repelita IV ini mencapai 25 juta ton, maka berarti kita telah memasuki tingkat swasembada beras. Namun hal ini sama sekali tidak boleh membuat kita lengah. Di Tanah Air kita masih ada daerah-daerah yang rawan pangan dan daerah-daerah yang masih terbelakang. Di samping itu kita masih harus meningkatkan produksi pangan terutama dengan memanfaatkan potensi lahan-lahan yang masih tersedia dan pemeratakan usaha intensifikasi di seluruh daerah.

Di samping itu kita harus mulai menerapkan teknologi tepat guna baik untuk kegiatan sebelum panen maupun sesudah panen. Dalam usaha memenuhi kebutuhan pangan yang akan meningkat di tahun-tahun yang akan datang, maka kita pun harus meningkatkan produksi pangan lain di luar beras seperti jagung, ubi-ubian dan lain-lainnya. Demikian pula kita masih harus makin meningkatkan lagi produksi ternak dan ikan, baik untuk mempertinggi mutu makanan masyarakat kita maupun untuk ekspor. Langkah-langkah yang serupa juga harus kita lakukan secara besar-besaran dalam bidang perkebunan, baik untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri maupun untuk ekspor.

Dalam pada itu kemajuan-kemajuan penting juga kita capai dalam bidang industri. Sebagian besar kebutuhan masyarakat telah dapat kita penuhi sendiri, khususnya sandang dan perumahan. Kemajuan-kemajuan kita capai dalam industri tekstil, kendaraan bermotor, barang-barang elektronika; demikian pula industri yang mengolah kekayaan alam kita sendiri seperti pupuk urea, semen, ban kendaraan bermotor, kayu lapis, pulp dan kertas, aluminium dan besi baja. .

Namun, pertumbuhan industri itu terganggu oleh resesi ekonomi dunia yang berlarut. Jika dalam tiga tahun pertama dalam Repelita III sektor industri maju dengan pesat, maka menjelang akhir Repelita III itu tingkat pertumbuhan industri kita agak menurun. Secara keseluruhan pertumbuhan industri kita selama lima tahun terakhir mencapai rata-rata 8,9% setiap tahun. Hal ini berarti lebih rendah dari yang kita rencanakan semula dalam Repelita III sebesar 11%.

Karena itu kita menyadari bahwa tantangan kita dalam Repelita IV ini sungguh tidak ringan, lebih-lebih untuk mewujudkan tekad kita: dalam meletakkan kerangka landasan di bidang ekonomi, khususnya dalam memacu pertumbuhan industri yang kita perlukan.

Seperti yang ditunjukkan dalam GBHN maka dalam tahap tinggal landas nanti dalam bidang ekonomi kita harus memiliki struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian, sehingga tahan uji dan mampu mendorong pembangunan kita selanjutnya dengan kekuatan sendiri. Ini berarti dalam Repelita IV ini pembangunan industri harus mendapatkan perhatian kita yang sebesar-besarnya.

Sementara itu, pembangunan pertanian akan kita lanjutkan, kita tingkatkan dan kita perluas. Segala kebijaksanaan, langkah dan hasil pembangunan pertanian yang telah kita capai

selama tiga Repelita yang lalu akan kita teruskan, kita tingkatkan, kita perbaiki, sehingga bidang pertanian benar-benar menjadi pendukung yang handal dari pembangunan industri.

Melihat hasil pembangunan industri selama tiga Repelita yang lalu, kita mempunyai alasan yang kuat untuk meningkatkan dan memperluas pembangunan industri di masa-masa yang akan datang. Sektor industri yang telah mencapai pertumbuhan cukup tinggi di tahun-tahun yang lalu, telah mempunyai pengaruh yang positif terhadap gerak pembangunan. Kebutuhan rakyat banyak dan kebutuhan pembangunan makin banyak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Di samping telah menimbulkan kepercayaan yang meningkat pada rakyat banyak atas produksi dalam negeri sendiri, maka berbagai jenis produksi dalam negeri pun telah mulai memasuki pasaran dunia. Hasil kekayaan alam makin banyak bisa diolah oleh industri kita sendiri sehingga meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian kita. Pembangunan industri telah ikut menggerakkan pembangunan di daerah-daerah dan sekaligus merupakan unsur yang memperluas pemerataan. Secara umum, perkembangan sektor industri dewasa ini telah menciptakan kekuatan-kekuatan dan potensi dinamis dalam gerak kita selanjutnya dalam menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang. Dalam hubungan ini kita harus terus menggerakkan masyarakat untuk mempercayai dan membanggakan hasil karya produksi dan jasa bangsa sendiri, yang akan merupakan kekuatan yang tak terkirakan besarnya bagi dorongan peningkatan kemampuan dalam negeri sendiri.

Bagaimanapun juga, semua hasil yang telah kita capai itu baru lah merupakan tahap-tahap yang sangat awal dari pembangunan industri yang kita pikirkan. Dalam Repelita IV ini pertumbuhan dan pengembangan sektor industri tidak cukup hanya dengan membangun pabrik-pabrik baru, tidak cukup hanya dengan

memperbanyak jenis industri; melainkan kita harus melangkah maju dengan memantapkan proses industrialisasi yang terpadu dalam arti yang seluas-luasnya.

Dalam memantapkan proses industrialisasi ini, cakrawala pandangan kita harus menjangkau jauh ke depan, ialah pada tahap tinggal landas dalam Repelita VI nanti. Pola dan struktur industri nasional kita dalam tahap tinggal landas nanti sudah harus kita tentukan dan harus kita mulai pembangunannya dari sekarang.

Kita memandang proses industrialisasi kita itu sebagai pembangunan sektor industri yang mandiri; dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang moderen, maju, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila. Sama halnya dengan proses industrialisasi yang dialami oleh bangsa-bangsa lain yang manapun, maka dari sekarang kita harus sadar bahwa proses industrialisasi itu akan membawa serta berbagai perubahan besar yang memerlukan kesiapan bangsa kita secara politis, sosial dan mental. Di samping pemupukan dana-dana yang diperlukan, terutama untuk membeli barang-barang modal, maka proses industrialisasi itu lebih-lebih memerlukan penguasaan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan moderen, memerlukan bermacam-macam keahlian dan berbagai jenis ketrampilan di sernua sektor. Yang juga tidak kalah penting adalah tampilnya sikap pembaharuan yang terus menerus untuk selalu siap menghadapi kebutuhan-kebutuhan dan perkembangan baru yang makin cepat akan dibawa oleh proses industrialisasi itu sendiri. Inilah antara lain yang saya maksud dengan syarat-syarat peningkatan kualitas manusia, seperti yang tadi saya kemukakan.

Sumbu kekuatan dari proses industrialisasi yang kita rancang tidak hanya terletak pada aspek fisik kebendaannya belaka; melainkan lebih-lebih pada kualitas dan kemampuan manusianya, terutama dalam penguasaan teknologi dan keteknikan, rancang

bangun dan perekayasaan, manajemen, keahlian, kejuruan, ketrampilan dan kewiraswastaan.

Selanjutnya, kekuatan struktur industri nasional kita harus didukung oleh partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Hal ini berarti harus bangkitnya industri kecil yang tangguh; yang bersama-sama dengan industri menengah dan besar merupakan kesatuan yang terpadu dari seluruh kekuatan industri nasional kita.

Dengan meningkatnya kemampuan dan kualitas manusia tadi, maka proses industrialisasi kita dapat mandiri. Artinya : tidak rawan karena ketergantungan dari luar. .

Dalam pada itu, perlu saya ingatkan bahwa kita memang bertekad untuk mendorong industri dalam negeri, baik untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri maupun untuk kita ekspor. Sama penting dengan tekad itu, kita pun harus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang mempunyai dasar yang sehat, kuat dan tahan uji. Ini penting justru pada tahap kita meletakkan kerangka landasan dalam Repelita IV. Industri dalam negeri harus dilindungi, tetapi sama sekali tidak boleh dimanjakan. Ini berarti produksi dalam negeri harus mampu mempunyai daya saing terhadap barang impor, harus mampu mempunyai daya saing di pasaran internasional. Untuk itu peningkatan mutu produksi dalam negeri harus terus diusahakan dan efisiensi produksi serta efisiensi pemasaran harus ditingkatkan pula. Tanpa peningkatan mutu maka kita tidak pernah akan menang dalam persaingan di pasaran internasional yang semakin keras.

Sidang. Dewan yang saya hormati;

Demikianlah, secara keseluruhan selama Repelita III kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 6%, sedangkan sasaran yang ingin kita capai semula adalah sekitar 6,5%. Laju pertumbuhan yang kita capai tadi cukup membesarkan hati, kalau

kita ingat bahwa pembangunan Repelita III itu berlangsung di tengah-tengah terjadinya resesi dunia yang berkepanjangan.

Laju pertumbuhan ekonomi kita yang cukup besar tadi, terutama pada tahun-tahun awal, terjadi karena perkembangan investasi yang cukup besar pula. Dalam kurun waktu Repelita III itu investasi telah meningkat dengan rata-rata sekitar 29% setiap tahun. Investasi ini bersumber dari tabungan masyarakat dan tabungan Pemerintah, yang terutama berasal dari sumber-sumber dana dalam negeri sendiri dan dilengkapi dengan sumber-sumber dana dari luar.

Gambaran umum tadi menunjukkan tekad kita untuk terus menerus menaikkan kemampuan membangun dengan kekuatan sendiri.

Dalam rangka mengerahkan dana pembangunan dari sumber dalam negeri itulah, maka di satu pihak, Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara semaksimal mungkin, dan di lain pihak mengefisiensikan pengeluaran negara. Dalam meningkatkan penerimaan negara kita harus tetap bersikap realistis, artinya kita jangan memaksa diri memikul beban yang tidak mampu kita pikul. Dalam rangka itulah, Pemerintah masih melihat adanya sumber-sumber dana dari masyarakat yang masih dapat dikerahkan, melalui pembaharuan perpajakan nasional. Dalam kesempatan ini, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat, yang bersama-sama Pemerintah telah menyelesaikan sejumlah undang-undang perpajakan; ialah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sebagai sistem yang baru, maka undang-undang perpajakan itu memerlukan kesiapan yang sebaik-baiknya pada aparatur perpajakan dan seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan dunia usaha. Setelah mengamati secara teliti, menjelang pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah --yang berdasarkan undang-undang tersebut seharusnya mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984 yang lalu--, maka Pemerintah melihat bahwa persiapan untuk melaksanakan undang-undang ini masih perlu ditingkatkan lagi, baik di kalangan aparatur perpajakan sendiri maupun di kalangan masyarakat. Karena itulah, setelah mengadakan konsultasi dengan Saudara-saudara Pimpinan Dewan yang terhormat, maka pada tanggal 16 Juni '84 saya telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1984 untuk menanggukhkan mulai berlakunya Undang-undang Pertambahan Nilai 1984, ialah sampai selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1986. Sementara itu kesiapan aparatur perpajakan dan masyarakat luas terus ditingkatkan secara lebih intensif dengan tujuan agar pelaksanaan undang-undang ini dapat berjalan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuannya. Jika sekiranya kesiapan tadi telah cukup matang, maka Pemerintah berkehendak untuk bisa memberlakukannya sebelum 1 Januari 1986.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar pula maka selanjutnya adalah wewenang konstitusional Dewan yang terhormat untuk memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang telah saya keluarkan itu.

Saudara-saudara Anggota Dewan yang terhormat;

Walaupun kita bertekad untuk membangun dengan kekuatan sendiri, kita juga menyadari bahwa untuk mempercepat jalannya pembangunan kita masih memerlukan kerjasama yang saling

menguntungkan dengan pihak luar negeri. Hal ini merupakan hal yang wajar saja dalam sistem ekonomi dunia yang makin lama terasa makin menjadi satu dan dalam suasana semua negara saling memerlukan serta jalin menjalin kepentingan satu dengan yang lain.

Dalam pada itu, selama Repelita III investasi dalam bentuk penanaman modal asing maupun modal dalam negeri juga terus meningkat, yang mencapai puncaknya pada tahun keempat. Dalam Repelita IV nanti investasi untuk mempercepat pembangunan harus kita perbesar; baik investasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan dana anggaran negara, investasi oleh dunia usaha swasta nasional, investasi oleh kalangan masyarakat luas maupun investasi oleh penanam modal asing.

Pemerintah akan terus menerus berusaha untuk mengembangkan kebijaksanaan dan menciptakan suasana yang dapat memperbesar investasi itu, terutama untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta kegairahan kalangan masyarakat luas untuk mengambil tanggung jawab dalam pembangunan nasional. Langkah-langkah yang baru-baru ini telah diambil Pemerintah untuk menyederhanakan perizinan dan mengurangi perizinan sampai batas yang benar-benar diperlukan merupakan salah satu usaha dalam rangka mendorong kegairahan investasi dan kelancaran kegiatan ekonomi dan pembangunan pada umumnya. Langkah-langkah tersebut akan terus dilanjutkan. Jika di sana-sini ada langkah penertiban, maka langkah itu tidak lain adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan umum yang sejak semula telah digariskan dan justru bermaksud untuk mendorong pelaksanaan investasi yang sehat.

Sementara itu keadaan neraca pembayaran kita tetap kita kendalikan agar tetap memadai untuk mendukung pembangunan.

Bagian terbesar penerimaan devisa kita memang masih berasal dari gas dan minyak bumi. Keadaan ini masih akan berlang-

sung selama Repelita IV ini. Kita menyadari sedalam-dalamnya bahwa ketergantungan penerimaan devisa yang besar kepada ekspor minyak dan gas bumi ini mengandung kerawanan-kerawanan. Karena itu sejak dalam Repelita III kita telah berusaha sekuat tenaga untuk mendorong, memperluas dan meningkatkan ekspor barang-barang lain di luar minyak dan gas bumi. Selama Repelita III nilai ekspor di luar minyak dan gas bumi mengalami pasang surut, walaupun perkembangannya menunjukkan kenaikan rata-rata sekitar 11 % setiap tahun. Usaha untuk meningkatkan ekspor di luar minyak dan gas bumi akan terus kita tingkatkan untuk terus menaikkan penerimaan devisa, untuk menggerakkan perekonomian maupun untuk memperluas lapangan kerja. Karena itulah tidak, henti-hentinya kita menyiapkan diri dan memperbaiki diri di segala segi kegiatan ekspor ini, agar kita benar-benar selalu berhasil dalam melakukan penerobosan pasar di berbagai wilayah pasaran dunia. Tugas ini jelas tidak mudah. Walaupun makin hari makin banyak jumlah dan jenis barang ekspor kita yang dapat memasuki pasaran dunia, namun perbaikan dan penyempurnaan masih banyak lagi yang harus kita lakukan; termasuk kalangan dunia usaha ekspor swasta.

Resesi ekonomi dunia yang berjalan bertahun-tahun telah semakin memperkuat langkah-langkah proteksi di negara-negara industri sehingga makin mempersempit usaha pengembangan ekspor negara-negara yang sedang membangun. Karena itu, di samping berjuang melalui perundingan dalam berbagai fora internasional, Pemerintah secara terus menerus mengambil kebijaksanaan dan langkah untuk mendorong ekspor ini. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan pengusaha-pengusaha ekspor sendiri untuk bersaing dalam mutu dan harga serta memantapkan pasaran di luar negeri.

Di bidang impor, Pemerintah terus berusaha untuk lebih mengefisienkan penggunaan devisa untuk impor ini. Selama

Repelita III perkembangan impor bergerak ke arah yang makin sehat. Dari tahun ke tahun bagian impor untuk barang konsumsi makin kecil, sebaliknya bagian impor untuk bahan baku, bahan penolong dan barang modal makin besar. Hal ini juga mencerminkan majunya produksi dalam negeri, karena bertambah banyaknya jumlah dan jenis barang yang dapat kita hasilkan sendiri.

Demikianlah perkembangan ekspor dan impor kita selama kurun waktu Repelita III.

Dengan sikap hati-hati dan waspada, disertai dengan tekad untuk mempertahankan kurs rupiah yang realistis, kita terus berusaha agar dalam tahun '84 ini neraca pembayaran luar negeri kita akan dapat lebih baik lagi dari yang telah kita capai dalam tahun '83 yang lalu.

Khususnya mengenai stabilitas ekonomi, maka selama Repelita III inflasi dapat kita kendalikan sekitar 11% setiap tahun. Suatu tingkat yang kurang lebih sama dengan yang dialami oleh kebanyakan negara industri dan lebih rendah jika dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara yang sedang membangun.

Kita memandang penting arti stabilitas ekonomi itu dalam rangka menantapkan stabilitas nasional, sebab kita akan mengalami kesulitan-kesulitan besar dalam melaksanakan pembangunan jika kita tidak dapat memelihara stabilitas nasional.

Para Anggota Dewan yang terhormat;

Adalah suatu kenyataan bahwa selama tiga kali Repelita, kita melihat pemerataan yang makin meluas dan ekonomi yang terus tumbuh. Sesuai dengan Trilogi Pembangunan, pemerataan dan pertumbuhan itu berhasil kita kembangkan dengan tetap menjaga stabilitas nasional.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di tengah-tengah badai resesi ekonomi dunia yang melanda di mana-mana, kita masih dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat, dapat meneruskan pertumbuhan ekonomi dan dapat menjaga stabilitas. Secara keseluruhan dapat pula dengan perasaan lega kita mengatakan, bahwa kita memiliki ketahanan ekonomi yang cukup tangguh dalam menghadapi hantaran-hantaman resesi ekonomi dunia tadi. Singkatnya kita telah bisa terhindar dari krisis ekonomi, yang jika kita tidak waspada dan berani mengambil langkah-langkah yang tepat bisa mendatangkan kesulitan-kesulitan yang jauh lebih besar.

Langkah-langkah yang telah kita ambil dalam mengatasi tantangan-tantangan ekonomi memang terasa pahit dan berat. Namun sebagai bangsa pejuang, yang melaksanakan pembangunan nasional dengan elan perjuangan, kita semua telah menunjukkan tanggung jawab bersama untuk mengatasi keadaan yang sangat sulit. Langkah itu, seperti yang telah kita ketahui bersama, adalah antara lain : pengendalian pengeluaran Pemerintah yang tepat, pengurangan subsidi BBM, devaluasi, penjadwalan kembali proyek-proyek Pemerintah dan kebijaksanaan perbankan yang telah kita ambil dalam tahun 1983 yang lalu.

Dengan mengamati secara teliti dan sejujur-jujurnya semua perkembangan dan pertumbuhan yang dapat kita capai bersama-sama selama tiga Repelita seperti yang tadi saya gambarkan, maka kita mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa kita telah siap untuk menciptakan kerangka landasan dalam Repelita IV ini untuk selanjutnya kita mantapkan kerangka landasan tersebut dalam Repelita ke-V, sehingga jalan dan landasan menuju masyarakat adil dan- makmur berdasarkan Pancasila terbuka lebar dan kokoh.

Dengan kesadaran itu, kita bukannya harus menjadi lengah. Sebaliknya, hendaknya tambah mempertebal kesadaran dan kewaspadaan kita agar kita tetap berhati-hati memasuki dan melaksanakan Repelita IV ini, bekerja keras dan tetap berhemat.

Tahun-tahun di depan kita tetap akan merupakan tahun-tahun yang sulit. Di dalam negeri kita masih harus memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi yang cukup besar seperti perluasan kesempatan kerja, masalah kependudukan yang harus kita pecahkan melalui peningkatan pelaksanaan keluarga berencana dan transmigrasi, memenuhi hasrat anak-anak bangsa ini untuk menikmati pendidikan yang makin tinggi, impian berjuta-juta keluarga untuk menempati perumahan yang sehat dan banyak keinginan lain untuk merasakan kehidupan bahagia, sejahtera dan menyejukkan hati seperti yang kita cita-citakan dalam alam kemerdekaan.

Sementara itu perkembangan internasional belum menunjukkan adanya tanda-tanda yang meyakinkan bahwa dunia akan damai, tenteram dan adil. Bayang-bayang bahaya tetap ada : perebutan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar dunia, perlombaan senjata yang menjadi-jadi dan juga pertarungan ekonomi.

Secara khusus kita harus secara teliti mengamati perkembangan ekonomi dunia termasuk perkembangan harga minyak bumi yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian kita dewasa ini.

Dengan berpegang teguh pada pesan Pembukaan Undang-Undang Dasar untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif kita akan melanjutkan usaha-usaha untuk mencegah dunia jangan terjerumus ke dalam keadaan yang lebih parah. Di lain pihak kita berusaha

menggalang pendapat umum dunia agar bangkit kesadaran internasional untuk membangun tata dunia yang lebih adil di lapangan ekonomi dan lebih damai di lapangan politik.

Untuk itu kita memang telah terus menerus berusaha. Sesuai dengan kemampuan, kita terus berperan dalam penyelesaian masalah-masalah dunia yang mengancam perdamaian dan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Sesuai dengan petunjuk GBHN, maka kita pun terus mengambil langkah-langkah bersama dalam mengembangkan dan memperluas kerjasama Asean, yang selama ini telah berkembang bertambah mantap. Brunei Darussalam telah masuk ke dalam Asean dan memperkuat organisasi regional kita itu.

Di samping meneruskan pembangunan sejumlah proyek bersama, maka tahun-tahun terakhir ini kerjasama Asean makin meluas meliputi bidang perhubungan dan telekomunikasi, keuangan dan perbankan, pabean, pencegahan pajak ganda, kerjasama kalangan wanita, kerjasama antar pemuda, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesusasteraan dan lain-lain bidang. Semuanya itu membuat Asean makin kuat, karena makin luas dan mengakar dalam masyarakat.

Sementara itu Asean terus mengembangkan peranannya yang positif dalam menciptakan iklim politik dan hubungan kawasan yang serasi, yang mandiri dan bebas dari campur tangan kekuatan dari luar, sehingga benar-benar mengarah pada terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral dan sejahtera.

Mengenai masalah Kampuchea, Indonesia bersama-sama anggota Asean lainnya teguh dalam pendirian dan terus mengusahakan agar seluruh pasukan asing ditarik ke luar dari Kampuchea, demi penghormatan yang tulus terhadap hak rakyat Kampuchea untuk menentukan pemerintahan nasionalnya, menentukan nasib

dan masa depannya sendiri. Sikap yang sama juga tetap kita pegang dalam menghadapi masalah Afganistan serta masalah Palestina khususnya dan Timur Tengah umumnya.

Kendati pun ada masalah, namun hubungan kita dengan tetangga tetangga di kawasan Pasifik Barat Daya dapat kita pelihara dengan baik dan kita tingkatkan.

Sementara itu sebagai salah satu pendiri Gerakan Non Blok, kita terus berusaha agar gerakan ini tetap berkembang dan mempertahankan kemurnian prinsip-prinsip dan cita-citanya. Perhatian yang besar tetap kita curahkan pada usaha-usaha untuk mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru. Dalam pada itu hubungan kita dengan negara-negara Eropah Timur kita usahakan dapat meningkat, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan sesuai dengan kebutuhan kita untuk meningkatkan pembangunan nasional.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Seringkali tanpa jemu jemu saya mengingatkan bahwa pembangunan berarti perubahan menuju kemajuan. Dan membangun bangsa yang 160 juta orang banyaknya, yang mendiami wilayah kepulauan yang demikian luas, yang beranekaragam latar belakang dan aspirasinya, yang sangat berbeda-beda tingkat pendidikan dan kemampuannya, tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Dalam keadaan seperti itu adalah wajar jika terdapat perbedaan dalam perubahan dan pertumbuhan antara sektor satu dengan sektor yang lain, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ini adalah realitas yang tidak perlu kita tutup-tutupi. Inilah yang acapkali mendaatkan kesan seolah-olah pembangunan kita menghasilkan

kehampaan atau kekacauan tata nilai, memperbesar ketidak-adilan serta mempersempit tanggung jawab dan partisipasi masyarakat.

Kadang-kadang ada yang memberi gambaran seolah-olah dalam melaksanakan pembangunan ini kita justru dijangkiti bermacam-macam penyakit yang sudah sangat parah, sehingga kita akan terjerumus ke dalam lembah kegagalan total.

Kita menghargai kritik semacam itu. Kita lebih waspada dalam menerima peringatan seperti itu.

Namun, jangan kita bersikap destruktif, seolah-olah hari depan kita diliputi kegelapan. Ini jelas tidak sesuai dengan kenyataan, karena itu menyesatkan dan tidak beralasan. Kita tetap mempunyai kepercayaan pada diri sendiri dan memandang masa depan dengan kepala tegak, karena selama ini kita memang telah mencapai banyak sekali kemajuan. Di samping itu dengan keteguhan hati dan dengan penuh keberanian kita telah mengadakan koreksi dan pembaharuan secara terus menerus dalam rangka menjamin kesinambungan, peningkatan dan perluasan pembangunan bangsa dan negara.

Dengan penuh kepercayaan kepada kemampuan kita sendiri, marilah kita bekerja lebih keras, lebih baik dan lebih tertib. Dengan persaudaraan dan saling percaya, dengan saling mengingatkan, dengan persatuan yang terus kita kukuhkan, marilah kita bangun bersama kerangka landasan pembangunan dalam Repelita IV ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

